

Pengaruh Indikator Makroekonomi, Upah Minimum, dan Demografis Terhadap Pengangguran di Indonesia

Nursinah Amrullah¹, Sanusi Fattah², Sabir³

¹Magister Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan Universitas Hasanuddin, Indonesia

^{2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.37531/sejaman.v5i1.1903>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan: 1) untuk menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi, 2) untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi, dan 3) untuk menganalisis pengaruh upah minimum terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penelitian pustaka. Analisis data dilakukan dengan uji regresi. Hasil penelitian: 1) indikator makroekonomi (pengeluaran pemerintah) berpengaruh negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Jika pengeluaran pemerintah bertambah maka pengangguran akan berkurang, 2) upah minimum berpengaruh positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Jika upah minimum meningkat maka pengangguran juga akan meningkat, dan 3) demografis secara langsung berpengaruh positif terhadap pengangguran yang berarti jika demografis meningkat maka pengangguran juga meningkat. Demografis secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pengangguran yang berarti jika demografis melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka pengangguran akan berkurang.

Kata Kunci: indikator makroekonomi, upah minimum, demografi, pengangguran

Copyright (c) 2022 Nursinah Amrullah

✉ Corresponding author :
Email Address : Nursinah@gmail.com

PENDAHULUAN

Pengangguran memang merupakan masalah yang rumit bagi setiap negara, tidak terkecuali bagi Indonesia. Permasalahan seputar pengangguran memang selalu menjadi pokok masalah sosial di negara berkembang seperti Indonesia. Pengangguran umumnya terjadi akibat dari jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Sebagai akibatnya timbul masalah-masalah sosial yang dapat merugikan personal maupun negara.

Masalah pengangguran memang selalu menjadi suatu persoalan yang perlu dipecahkan dalam perekonomian Negara Indonesia. Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin besar setiap tahunnya membawa akibat bertambahnya jumlah angkatan kerja sama dengan jumlah orang yang mencari pekerjaan akan meningkat, dan juga diikuti

bertambahnya tenaga kerja. Pengangguran dimulai ketika penduduk usia muda telah memenuhi syarat untuk bekerja (Axelrad, dkk, 2018). Oleh karena itu pemerintah harus segera memikirkan masalah pengangguran ini, sehingga dapat memutuskan langkah-langkah yang strategis sebagai upaya penanganan permasalahan pengangguran.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Februari 2019 sebesar 6,82 juta orang dan meningkat menjadi 6,88 juta orang pada Februari 2020.

Masalah pengangguran erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi. Jika pertumbuhan ekonomi ada, maka secara langsung akan menyerap tenaga kerja. Tetapi jika pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya hanya mampu menyerap tenaga lebih kecil dari jumlah pencari kerja, maka akan menyebabkan adanya sisa pencari kerja yang tidak mendapatkan pekerjaan sehingga jumlah pengangguran di Indonesia semakin meningkat. Tingkat pengangguran yang terlalu tinggi akan mempengaruhi stabilitas nasional setiap negara. Sehingga tiap negara berusaha untuk mempertahankan tingkat pengangguran pada tingkat yang wajar. Dalam teori makro ekonomi, masalah pengangguran pada pasar tenaga kerja yang juga dihubungkan dengan keseimbangan antara tingkat upah dan tenaga kerja. Tingkat pengangguran alamiah adalah suatu tingkat pengangguran yang alamiah dan tak mungkin dihilangkan. Artinya jika tingkat pengangguran paling tinggi 2-3% itu berarti bahwa perekonomian dalam kondisi penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) (Sukirno, 2007).

Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi angka pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan permasalahan jangka panjang yang dihadapi oleh suatu negara dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional riil. Sukirno (2007) dalam analisis makro menyatakan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara. Pertumbuhan ekonomi mengukur seberapa besar keberhasilan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mengalami pertambahan jumlah dan kualitas sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan bila pendapatan riil masyarakat pada tahun tertentu lebih besar dari pada pendapatan riil masyarakat pada tahun sebelumnya. Dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan Produk Domestik Bruto (PDB), yang berarti peningkatan Pendapatan Nasional (Tambunan, 2012).

Ekonomi Indonesia tahun 2019 tumbuh 5,02 persen, lebih rendah dibanding capaian tahun 2018 sebesar 5,17 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 10,55 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 10,62 persen. Sementara pada Triwulan I 2020 ekonomi Indonesia tumbuh 2,97% dan turun pada Triwulan II 5,32% (Badan Pusat Statistik, 2020).

Pengeluaran pemerintah dapat dikatakan sebagai alat intervensi pemerintah terhadap perekonomian yang dianggap paling efektif. Selama ini, tingkat efektifitas pengeluaran pemerintah dapat diukur melalui seberapa besar pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah suatu negara menggambarkan suatu pembiayaan terhadap kegiatan pemerintah. Pengeluaran pemerintah memberikan gambaran tentang pengeluaran pemerintah atas fasilitas dan pelayanan untuk pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, biasanya setiap tahun (Jeff-Anyeneh & Ibenta, 2019).

Pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan. Selain itu, keberhasilan pembangunan di suatu daerah disamping ditentukan oleh besarnya pengeluaran pemerintah juga dipengaruhi oleh besarnya investasi. Investasi atau penanaman modal adalah pembelian barang-barang modal dan perlengkapan produksi

untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian. Investasi disebut sebagai *engine of growth*, oleh karena itu tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan pada umumnya didukung oleh peningkatan investasi karena investasi berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Aurangzeb & Haq, 2012).

Pertumbuhan ekonomi banyak dipengaruhi oleh sektor industri yang menyerap banyak tenaga kerja. Salah satu hal yang terkait antara pelaku industri dan pekerja adalah upah minimum. Pekerja atau buruh, pengusaha, pemerintah dan masyarakat pada umumnya mempunyai kepentingan yang sama atas sistem dan kebijakan pengupahan. Pekerja atau buruh dan keluarganya sangat tergantung pada upah yang mereka terima untuk dapat memenuhi kebutuhan sandang, pangan, perumahan dan kebutuhan lainnya. Oleh karena itu para pekerja dan serikat pekerja atau serikat buruh selalu mengharapkan upah yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya (Sinaga, 2008). Kebijakan Upah Minimum telah menjadi hal yang penting dalam masalah ketenagakerjaan di beberapa negara baik maju maupun berkembang. Sasaran dari kebijakan upah minimum ini adalah untuk menutupi kebutuhan hidup minimum dari pekerja dan keluarganya. Selain itu yang menjadi tantangan ke depan adalah banyaknya jumlah pencari kerja yang didorong perubahan demografi di Indonesia.

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Salah satu keuntungan yang didapat Indonesia dari banyaknya jumlah penduduk adalah bonus demografi yang merupakan akibat dari besarnya proporsi penduduk usia produktif. Pengertian bonus demografi itu sendiri adalah ledakan penduduk usia produktif yaitu (usia 15 - 64 tahun), dimana tidak semua negara yang ada dunia mengalami kejadian bonus demografi. Indonesia akan mengalami bonus demografi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun 2020 - 2035 dimana jumlah usia angkatan kerja (15 - 64 tahun) mencapai sekitar 70%, sedangkan sisanya sebesar 30% adalah penduduk usia tidak produktif (yaitu usia 14 tahun ke bawah dan usia di atas 65 tahun) (BKKBN, 2020).

Bonus demografi ini dapat menjadi sebuah keuntungan besar bagi Indonesia, namun pemerintah harus menyiapkan generasi muda yang berkualitas melalui pendidikan, pelatihan, dan penyediaan lapangan pekerjaan. Apabila tidak mampu menghadapi kehadiran bonus demografi maka yang terjadi ialah ledakan pengangguran usia produktif dan meningkatnya beban pemerintah dalam hal kesejahteraan sosial. Namun demikian, bonus demografi ini juga dapat memunculkan masalah lain yakni bertambahnya jumlah pengangguran.

Dengan demikian, Teori Keynes diambil sebagai *grand theory* karena teori ini dapat mencakup semua variabel yang akan dikaji. Teori Keynes menyatakan bahwa pengangguran yang terjadi di masyarakat disebabkan adanya kekurangan permintaan umum terhadap barang dan jasa, sehingga tingkat upah yang tidak fleksibel dalam pasar tenaga kerja. Dalam keadaan perekonomian yang tidak berkembang, permintaan akan barang dan jasa dalam masyarakat menurun yang mengakibatkan produksi perusahaan juga menurun. Kondisi ini menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terpakai yang berakibat pada pengangguran. Menurunnya tingkat produksi akan berdampak pada menurunnya tingkat upah. Dengan adanya defisiensi permintaan agregat maka menyebabkan terjadinya pengangguran (Suhendra dan Wicaksono, 2016).

Keynes menganjurkan adanya campur tangan pemerintah dalam mempertahankan tingkat permintaan agregat untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat akan meningkat dan mendorong daya beli masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi akan terjadi. Penyediaan lapangan kerja dimaksudkan untuk mempertahankan pendapatan masyarakat agar daya beli masyarakat dapat terjaga dan diharapkan mampu untuk mengatasi pengangguran (Sukirno, 2004).

Tinjauan Literatur

Indikator Makroekonomi

Makroekonomi menurut Nanga (2005) merupakan cabang ilmu ekonomi yang menelaah perilaku dari perekonomian atau tingkat kegiatan ekonomi secara keseluruhan (*aggregate*), termasuk di dalamnya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian atau kegiatan ekonomi agregat tersebut. Menurut Bakti, dkk (2010:12) kebijakan makro ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah sebagai keikutsertaan pemerintah dalam memacu kehidupan ekonomi selalu dihadapkan kepada masalah pertumbuhan, inflasi, dan pengangguran sebagai *central issues macroeconomic*. Dengan kata lain bahwa yang menjadi masalah pokok dalam ekonomi makro dan mencakup keseluruhan variabel variabel dalam ekonomi makro adalah masalah pertumbuhan, inflasi dan pengangguran.

Berdasarkan pendapat Nanga (2005) dan Bakti, dkk (2010) dapat disimpulkan bahwa indikator makro ekonomi merupakan statistik yang menunjukkan status ekonomi sebuah negara tergantung pada area tertentu dari ekonomi seperti industri, pasar tenaga kerja, perdagangan, dan lainnya. Indikator dalam makro ekonomi mencakup pertumbuhan, inflasi dan pengangguran.

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebenarnya merupakan masalah perekonomian jangka panjang, dan oleh Simon Kuznets, seorang ahli ekonomi terkemuka di Amerika Serikat yang pernah memperoleh hadiah Nobel menyatakan bahwa, proses pertumbuhan ekonomi tersebut dinamakannya sebagai Modern Economic Growth dimana dalam periode tersebut, dunia telah mengalami perkembangan pembangunan yang sangat nyata apabila dibandingkan dengan periodeperiode sebelumnya (Ramayani, 2015). Indikator yang digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi adalah tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Terdapat beberapa alasan yang mendasari pemilihan pertumbuhan PDB dan bukan indikator lainnya seperti pertumbuhan Produk Nasional Bruto (PNB) sebagai indikator pertumbuhan. Untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, data PDB yang digunakan adalah data PDB atas harga konstan. Dengan menggunakan data atas dasar harga konstan, maka pertumbuhan PDB semata-mata hanya mencerminkan pertumbuhan output yang di hasilkan perekonomian pada suatu periode tertentu.

GDP mengukur nilai pasar dari barang dan jasa akhir yang di produksi oleh sumber daya yang berada dalam suatu negara selama jangka waktu tertentu, GDP sering digunakan sebagai salah satu tolak ukur yang digunakan untuk mengetahui perkembangan suatu negara dan dapat dibandingkan antara satu negara dengan negara lain dengan mengkonversikannya menjadi satu mata yang sama (Richard & Toly, 2013).

Investasi

Tendelilin (2001:1) mengemukakan bahwa “investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan dimasa datang”. Sementara Ahmad (2014:3) mengartikan investasi sebagai “menempatkan uang atau dana dengan harapan untuk memperoleh tambahan atau keuntungan tertentu atas uang atau dana tersebut”.

Berdasarkan pendapat Tendelilin (2001), Ahmad (2014), dan (Jogiyanto, 2003) dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan pengorbanan yang dilakukan pada hari ini untuk memperoleh manfaat lebih baik di waktu yang akan datang. Investasi merupakan persiapan keuangan dengan penanaman modal dengan membeli suatu bentuk produk yang bukan untuk dikonsumsi dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa depan.

Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah (Government Expenditure) adalah pengeluaran oleh pemerintah untuk membeli barang dan jasa. Sebagian dari pengeluaran pemerintah adalah untuk membiayai administrasi pemerintahan atau pengeluaran rutin dan sebagian lainnya untuk membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan atau pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin pemerintah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, angsuran pinjaman/hutang dan bunga, ganjaran subsidi dan sumbangan pada daerah, pensiun dan bantuan, pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain, dan pengeluaran tak terduga. Pengeluaran Pemerintah merupakan bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah (Sukirno, 2004).

Upah Minimum

Sumarsono (2003) mengemukakan bahwa upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan karyawan termasuk tunjangan, baik untuk karyawan itu sendiri maupun untuk keluarganya.

Adapun tujuan ditetapkannya upah minimum menurut Asyhadie (2007) yaitu: 1) untuk menonjolkan arti dan peranan pekerja/buruh sebagai subsistem dalam suatu hubungan kerja, 2) Untuk melindungi kelompok kerja dari adanya sistem pengupahan yang sangat rendah dan yang secara materiil kurang memuaskan, 3) Untuk mendorong kemungkinan diberikannya upah yang sesuai dengan nilai pekerjaan yang dilakukan, 4) Untuk mengusahakan terjaminnya ketenangan dan kedamaian kerja dalam perusahaan, dan 5) Mengusahakan adanya dorongan peningkatan dalam standar hidup secara normal.

Pemerintah menetapkan upah yang harus dibayar oleh perusahaan kepada para pekerja, upah ini diberi nama upah minimum. Bagi sebagian pekerja, upah minimum ini tidak berpengaruh karena mereka sudah menikmati upah di atas upah minimum. Bagi sebagian lainnya, terutama yang tidak terdidik dan tidak berpengalaman hal ini berpengaruh, karena upah minimum mengurangi jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan sehingga berpotensi meningkatkan pengangguran (Mankiw, 2006).

Demografis

Demografi menurut Hauser dan Duncan (Adioetomo dan Samosir, 2013) adalah ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial, dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalitas (fertilitas), mortalitas, dan gerak teritorial (migrasi). Demografi sangat erat kaitannya dengan penduduk usia kerja dan jumlah populasi dalam suatu wilayah (Prskawetz & Sambt, 2014). Demografi menurut Adioetomo dan Moertiningsih (2005) mencakup berbagai hal seperti jumlah, persentase kenaikan, jenis kelamin, umur, pekerjaan, kesehatan, angka kelahiran, gaya hidup, perkawinan dan lain-lain hal tentang pendudukan.

Menurut *Adioetomo dan Samosir* (2013) demografi dipengaruhi oleh fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Demografi mempelajari persoalan dan keadaan perubahan-perubahan penduduk atau segala hal yang berhubungan dengan komponen-komponen perubahan, sehingga menghasilkan suatu keadaan dan komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Demografi menghasilkan teknik-teknik untuk menghitung data kependudukan. Dengan teknik tersebut dapat diperoleh perkiraan keadaan penduduk di masa depan atau di masa lampau.

Pengangguran

Pengangguran menurut Mankiw (2006:154) adalah “masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan masalah yang paling berat”. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Pengangguran dapat dicegah dengan sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas yang dapat menjamin terciptanya permintaan yang menyerap semua penawaran (supply). Pengangguran dapat pula terjadi dikarenakan alokasi sumber daya yang kurang tepat (Gilarso, 2004).

Hipotesis Penelitian

- H₁ = Pengeluaran pemerintah berpengaruh terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.
 H₂ = Upah minimum berpengaruh terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.
 H₃ = Demografis berpengaruh terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif yang dilakukan dalam bentuk analisis jalur dengan data runtun waktu (*time series*) dalam periode tahunan yaitu tahun 2012 sampai dengan tahun 2021.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Indonesia. Penelitian berupa pengambilan data sekunder dari situs Badan Pusat Statistik Indonesia, Bank Indonesia, World Bank, dll. Waktu penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2022.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data perekonomian di Indonesia. Sampel dalam penelitian ini berdasarkan variabel-variabel yang digunakan yakni pengeluaran pemerintah, upah minimum, investasi, pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk (demografis), dan pengangguran.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang digunakan diperoleh dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan berbagai sumber lainnya sesuai dengan kebutuhan data dalam penelitian ini.

Metode Analisis Data

Model persamaan simultan menurut Mankiw, dkk (1992) dapat dilihat sebagai berikut:

Model Persamaan dari penelitian ini dapat dilihat dari persamaan berikut:

$$Y_1 = f(X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (4.1)$$

$$Y_2 = f(X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (4.2)$$

$$Y_3 = f(Y_1, Y_2, X_1, X_2, X_3) \dots\dots\dots (4.3)$$

Dimana:

X_1 = Pengeluaran Pemerintah

X_2 = Upah Minimum

X_3 = Demografis

Y_1 = Investasi

Y_2 = Pertumbuhan Ekonomi

Y_3 = Pengangguran

Hasil Penelitian

Pengaruh antara variabel independen dan variabel dependen dianalisis dengan menggunakan aplikasi AMOS untuk menjawab hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil uji antara variabel independen dan variabel dependen disajikan pada table berikut:

Tabel 5.1 Pengaruh Antar Variabel

	Koefisien	t _{hitung}	Probability
Investasi ← Pengeluaran Pemerintah	0.713	4.223	***
Investasi ← Upah Minimum	-1.576	-7.889	***
Investasi ← Demografis	0.845	7.221	***
Pertumbuhan Ekonomi ← Pengeluaran Pemerintah	1.663	9.861	***
Pertumbuhan Ekonomi ← Upah Minimum	-0.861	-6.648	***
Pertumbuhan Ekonomi ← Demografis	2.337	11.732	***
Pengangguran ← Pengeluaran Pemerintah	-0.807	-5.773	***
Pengangguran ← Upah Minimum	1.807	8.536	***
Pengangguran ← Demografis	3.571	14.944	***

Tabel 5.2 Pengaruh Langsung dan Tidak Langsung Variabel Independen ke Variabel Dependen

Hubungan Variabel	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Pengaruh Total
Pengeluaran Pemerintah → Pengangguran	-1.384***	-0.291***	-1.675***
Upah Minimum → Pengangguran	0,785***	0,153***	0.938***
Demografis → Pengangguran	2,466***	-0.362***	2.104***

Sumber: Hasil Olah Data Penelitian menggunakan AMOS 26, tahun 2021

Analisis antar variabel dan analisis hubungan langsung dan tidak langsung antara variabel independen dan variabel dependen disajikan pada table berikut:

Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran

Hasil uji pada Tabel 5.1 menunjukkan nilai probabilitas (P) < 0,05 yang berarti pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Berdasarkan Tabel

5.2 pengeluaran pemerintah berpengaruh langsung terhadap pengangguran dengan nilai koefisien -1.384. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap pengeluaran pemerintah mengalami kenaikan 1 persen maka pengangguran akan mengalami penurunan sebesar 1.384 persen. Sementara pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai koefisien -0.291 yang berarti setiap pengeluaran pemerintah melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 1 persen maka secara tidak langsung akan mengurangi pengangguran sebesar 0.291 persen. Pengaruh total pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran sebesar -1.675, yang berarti setiap pengeluaran pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1 persen, secara langsung dan tidak langsung akan mengurangi pengangguran sebesar 1.675. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima yang berarti pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran

Hasil uji pada Tabel 5.1 menunjukkan nilai probabilitas (P) < 0,05 yang berarti upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Berdasarkan Tabel 5.2 upah minimum berpengaruh langsung terhadap pengangguran dengan nilai koefisien 0,785. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap upah minimum mengalami kenaikan 1 persen maka pengangguran akan mengalami peningkatan sebesar 0,785 persen. Sementara pengaruh tidak langsung upah minimum terhadap pengangguran melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai koefisien 0,153 yang berarti setiap upah minimum melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 1 persen maka secara tidak langsung akan menaikkan pengangguran sebesar 0.291 persen. Pengaruh total upah minimum terhadap pengangguran sebesar 0.938 yang berarti setiap upah minimum mengalami peningkatan sebesar 1 persen, secara langsung dan tidak langsung akan menaikkan pengangguran sebesar 0.938. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima yang berarti upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pengaruh Demografis terhadap Pengangguran

Hasil uji pada Tabel 5.1 menunjukkan nilai probabilitas (P) < 0,05 yang berarti demografis berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Berdasarkan Tabel 5.2 demografis berpengaruh langsung terhadap pengangguran dengan nilai koefisien 2,466. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap demografis mengalami kenaikan 1 persen maka pengangguran akan mengalami peningkatan sebesar 2,466 persen. Sementara pengaruh tidak langsung demografis terhadap pengangguran melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi menunjukkan nilai koefisien -0.362 yang berarti setiap demografis melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 1 persen maka secara tidak langsung akan menurunkan pengangguran sebesar 0.362 persen. Pengaruh total demografis terhadap pengangguran sebesar 2.104 yang berarti setiap demografis mengalami peningkatan sebesar 1 persen, secara langsung dan tidak langsung akan menaikkan pengangguran sebesar 2.104. Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini diterima yang berarti demografis berpengaruh signifikan terhadap pengangguran secara langsung dan tidak langsung melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi

Pembahasan

Pengeluaran pemerintah (X_1) dan investasi (Y_1)

Hasil uji menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 4,223. Nilai didistribusikan pada $\alpha = 0,05$ dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $4,223 > 2,446$. Dengan nilai $p < 0,05$ maka pengaruh yang diberikan bernilai

signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap investasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Siregar (2016) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap investasi.

Pemerintah dapat mengalokasikan pengeluarannya ke dalam modal investasi untuk meningkatkan sektor industri dan lainnya. Kebijakan ini sebagaimana dinyatakan dalam teori Keynes bahwa pemerintah memegang peranan dalam mengatur peredaran uang. Uang yang beredar dapat digunakan sebagai modal investasi untuk mendorong sektor produksi.

Peranan investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta sangat penting dalam pembangunan ekonomi, karena kegiatan investasi tidak hanya atau meningkatkan permintaan agregat tetapi juga akan meningkatkan pemasaran agregat melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Dengan meningkatnya kapasitas produksi. Produktivitas juga akan meningkat, sehingga dalam perspektif waktu yang lebih panjang investasi akan meningkatkan *capital stock*, dimana setiap penambahan *stock capital* akan meningkatkan pula kemampuan masyarakat untuk menghasilkan output yang pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja (Sukirno, 2004).

Pengeluaran pemerintah (X_1) dan pertumbuhan ekonomi (Y_2)

Hasil uji menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 9.861. Nilai didistribusikan pada $\alpha = 0,05$ dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $9.861 > 2,446$. Dengan nilai $p < 0,05$ maka pengaruh yang diberikan bernilai signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian Anitasari dan Soleh (2015) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Setiap pemerintah menaikkan pengeluarannya maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan.

Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian. Pemerintah melalui kebijakan yang dikeluarkan dapat mengatur berbagai kebijakan perekonomian untuk mendorong pertumbuhannya. Pengeluaran yang dilakukan pemerintah akan mempengaruhi berbagai sektor dalam perekonomian. Dengan pengeluaran yang produktif, maka perekonomian akan bertumbuh dengan meningkatnya produksi barang dan jasa. Dari satu periode ke periode lainnya, kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Disamping itu, tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan (Sukirno, 2006).

Penelusuran Harrod-Domar terhadap model pertumbuhan ekonomi di negara maju menemukan bahwa akumulasi investasi dan tabungan nasional merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi. Hal ini berkaitan dengan karakteristik investasi sebagai akselerasi dalam menciptakan pendapatan yang juga disebut dampak permintaan, serta proses multiplier dalam memperbesar akumulasi modal yang juga disebut dampak penawaran (Suyana, 2013). Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses penambahan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi barang dan jasa. Peningkatan produksi ini akan meningkatkan kebutuhan *input* tenaga kerja, sehingga akan memperluas penyerapan kesempatan kerja.

Pengeluaran pemerintah (X_1) dan pengangguran (Y_3)

Hasil uji menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 5.773. Nilai didistribusikan pada $\alpha = 0,05$ dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $5.773 > 2,446$. Dengan nilai $p < 0,05$ maka pengaruh yang diberikan bernilai signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Jirang, dkk (2018) bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, peningkatan pengeluaran pemerintah akan mengurangi tingkat pengangguran.

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran sebesar -1.384 dan pengaruh tidak langsung sebesar -0.291. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa pengaruh langsung pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran lebih besar daripada pengaruh tidak langsung pengeluaran pemerintah terhadap pengangguran melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pengeluaran pemerintah berperan langsung dalam mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia.

Pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pengangguran yang berarti jika pengeluaran pemerintah bertambah maka pengangguran akan berkurang. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah di berbagai sektor ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang.

Keynes menyatakan, dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mendorong berbagai sektor produksi untuk menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran akan berkurang. Pengeluaran pemerintah dapat dibelanjakan sebagai modal investasi untuk mengoptimalkan kegiatan-kegiatan produktif dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Dengan banyaknya kegiatan produksi maka kesempatan kerja akan terbuka lebar sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dan mengurangi pengangguran.

Upah Minimum (X_2) dan investasi (Y_1)

Hasil uji menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 7.889. Nilai didistribusikan pada $\alpha = 0,05$ dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $7,889 > 2,446$. Dengan nilai $p < 0,05$ maka pengaruh yang diberikan bernilai signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap investasi. Pengaruh yang diberikan bernilai negatif yang berarti kenaikan upah minimum akan menyebabkan turunnya tingkat investasi. Dalam penelitian Rahmawati (2013) dikemukakan peningkatan upah minimum bisa saja menurunkan investasi dikarenakan tingginya biaya produksi yang akan dikeluarkan perusahaan sehingga keuntungan yang diperoleh investor berkurang.

Keynes menyatakan, dengan kebijakan yang tepat, pemerintah dapat mengatur upah minimum dan mendorong berbagai sektor produksi. Namun demikian, kenaikan upah akan membuat biaya produksi makin tinggi yang dapat meningkatkan harga produk. Naiknya harga produk berpengaruh terhadap konsumen yang akan mengurangi pembelian bahkan berhenti menggunakan produk yang bersangkutan. Hal ini akan berdampak pada investor karena keuntungan yang diinginkan menurun. Turunnya investasi memengaruhi sektor produksi sehingga kebutuhan akan tenaga kerja juga berkurang.

Upah Minimum (X_2) dan pertumbuhan ekonomi (Y_2)

Hasil uji menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 6.648. Nilai didistribusikan pada $\alpha = 0,05$ dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $6,648 > 2,446$. Dengan nilai $p < 0,05$ maka pengaruh yang diberikan bernilai signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengaruh yang diberikan bernilai negatif yang berarti kenaikan upah minimum akan menyebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Luthfi dan Agustin (2021) yang menyatakan upah minimum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kenaikan upah akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Kurangnya produksi akan mengakibatkan kondisi ekonomi yang lesu dan kurangnya kesempatan kerja. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Dengan kebijakan pemerintah, maka perekonomian dapat tumbuh dengan baik.

Upah Minimum (X_2) dan pengangguran (Y_3)

Hasil uji menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 8,536. Nilai didistribusikan pada $\alpha = 0,05$ dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $8,536 > 2,446$. Dengan nilai $p < 0,05$ maka pengaruh yang diberikan bernilai signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa upah minimum berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Panjawa dan Soebagiyo (2014) yang menyatakan upah minimum berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran.

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan upah minimum berpengaruh positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Upah minimum berpengaruh positif terhadap pengangguran yang berarti jika upah minimum meningkat maka pengangguran juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan kenaikan upah minimum akan menjadi beban bagi perusahaan karena biaya untuk gaji karyawan akan bertambah sehingga pengeluaran juga akan bertambah. Dengan alasan tersebut perusahaan tidak menambah jumlah tenaga kerjanya atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran.

Pengangguran terjadi karena adanya kekakuan upah (*wage rigidity*) yaitu ketidakmampuan upah dalam melakukan penyesuaian sampai di titik ekuilibrium, di mana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja. Pengangguran yang disebabkan kekakuan upah akibat penyesuaian antara jumlah pekerja yang menginginkan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Namun, meningkatnya tingkat upah membuat penawaran tenaga kerja bertambah, sehingga membuat permintaan tenaga kerja berkurang. Akibatnya terjadi surplus tenaga kerja atau pengangguran. (Mankiw, 2012).

Peningkatan upah minimum membuat harga tenaga kerja juga ikut meningkat, hal ini membuat perusahaan menjadi terbebani dengan komponen upah pegawai. Perusahaan menilai bahwa upah yang diberikan semakin lama semakin besar. Maka perusahaan mengurangi rekrutmen tenaga kerja baru dan mulai melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pegawai yang sudah bekerja yang menyebabkan jumlah pengangguran bertambah. Keynes menyatakan pengaturan upah minimum yang tepat dapat menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran akan berkurang.

Demografis (X_3) dan investasi (Y_1)

Hasil uji menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 7,221. Nilai didistribusikan pada $\alpha = 0,05$ dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $7,221 > 2,446$. Dengan nilai $p < 0,05$ maka pengaruh yang diberikan bernilai signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa demografis berpengaruh signifikan terhadap investasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Wahyuni dan Pramono (2021) yang menyatakan demografi berpengaruh terhadap investasi.

Pertambahan penduduk dapat menjadi hal yang positif dimana banyaknya tenaga kerja yang tersedia. Tenaga kerja tersebut dapat mengisi berbagai sektor produksi untuk menghasilkan berbagai jenis barang. Keberadaan tenaga kerja yang produktif dapat menjadi keuntungan tersendiri bagi investor. Investor dapat berinvestasi pada sektor padat karya yang dapat membantu mengurangi pengangguran. Pertambahan penduduk juga akan meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa. Dalam teori Keynes, peningkatan kebutuhan masyarakat dapat meningkatkan permintaan agregat yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang bertumbuh akan menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.

Demografis (X_3) dan pertumbuhan ekonomi (Y_2)

Hasil uji menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 11,732. Nilai didistribusikan pada $\alpha = 0,05$ dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $11,732 > 2,446$. Dengan nilai $p < 0,05$ maka pengaruh yang diberikan bernilai signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa demografis berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Yuniyanto (2021) yang menyatakan pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, jika pertumbuhan penduduk meningkat maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keynes memandang pentingnya peredaran uang dalam meningkatkan perekonomian. Banyaknya uang yang beredar akan mendorong permintaan dan memacu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada adanya penambahan penduduk yang akan memperluas pasar serta mendorong spesialisasi yang pada gilirannya akan menghasilkan penambahan output atau hasil (Smith, 2012). Faktor yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan bonus demografi dengan pertumbuhan ekonomi, yaitu penawaran tenaga kerja (labor supply), peran perempuan, dan modal manusia. Penawaran tenaga kerja yang cukup besar harus ditunjang oleh kesempatan kerja yang memadai, karena jika tidak maka pengangguran terbuka akan semakin meningkat. Faktor kedua, menyatakan bahwa perempuan mempunyai peran yang besar dalam pengendalian kelahiran melalui keikutsertaan mereka dalam ber KB. Mengikuti KB merupakan jalan untuk mewujudkan harapan hidup sejahtera menjadi kenyataan. Perempuan lebih memilih memiliki anak yang berkualitas dibandingkan jumlah yang besar, sehingga mereka kemudian mampu ikut terjun ke pasar kerja. Di sisi yang lain mutu modal manusia menjadi salah satu kunci untuk pemanfaatan bonus demografi yang terjadi. Tanpa mutu modal manusia yang baik, maka kesempatan kerja tidak dapat dimanfaatkan dengan baik (Bloom, 2003).

Demografis (X_3) dan pengangguran (Y_3)

Hasil uji menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar 14,944. Nilai didistribusikan pada $\alpha = 0,05$ dengan df sebesar 6 sehingga diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 2,446 sehingga diperoleh hasil $t_{hitung} > t_{tabel}$ yakni $14,944 > 2,446$. Dengan nilai $p < 0,05$ maka pengaruh yang diberikan bernilai signifikan. Sehingga dapat dinyatakan bahwa demografis berpengaruh signifikan terhadap pengangguran. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Prasaja (2013) yang menyatakan jumlah penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran.

Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan demografis secara langsung berpengaruh positif terhadap pengangguran yang berarti jika demografis meningkat maka pengangguran juga meningkat. Demografis secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pengangguran yang berarti jika demografis melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka pengangguran akan berkurang. Namun secara keseluruhan, demografis berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hal ini dikarenakan penambahan jumlah penduduk membutuhkan lapangan kerja untuk menampung setiap orang untuk bekerja, namun kenyataannya lapangan kerja yang tersedia tidak dapat menyerap semua penduduk usia produktif.

Jumlah penduduk yang terus bertambah akan menyebabkan pengangguran terus meningkat. Jumlah penduduk yang terus meningkat, menyebabkan banyak penduduk yang masuk dalam kategori angkatan kerja yang jika tidak disertai dengan penciptaan lapangan kerja baru, maka akan banyak penduduk yang tidak memperoleh pekerjaan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mendukung teori yang dikemukakan oleh Keynes. Teori ini menyatakan bahwa kecenderungan ekonomi makro dapat memengaruhi perilaku individu ekonomi mikro. Keynes menekankan pentingnya permintaan agregat sebagai faktor utama penggerak perekonomian, terutama dalam perekonomian yang sedang lesu. Ia berpendapat bahwa kebijakan pemerintah dapat digunakan untuk meningkatkan permintaan pada level makro, untuk mengurangi pengangguran. Jika pengeluaran pemerintah meningkat maka uang yang

beredar juga akan bertambah yang mendorong meningkatnya permintaan agregat. Selain itu, bertambahnya uang yang beredar dapat digunakan sebagai modal investasi yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dengan kebijakan yang tepat, pemerintah juga dapat mengatur upah minimum dan mendorong berbagai sektor produksi untuk menyerap tenaga kerja sehingga pengangguran akan berkurang.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Indikator makroekonomi (pengeluaran pemerintah) berpengaruh negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Jika pengeluaran pemerintah bertambah maka pengangguran akan berkurang. Hal ini dikarenakan pengeluaran pemerintah di berbagai sektor ekonomi dapat membuka lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja yang banyak sehingga jumlah pengangguran dapat berkurang.
2. Upah minimum berpengaruh positif, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengangguran. Jika upah minimum meningkat maka pengangguran juga akan meningkat. Hal ini dikarenakan kenaikan upah minimum akan menjadi beban bagi perusahaan sehingga perusahaan tidak menambah jumlah tenaganya atau bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan bertambahnya jumlah pengangguran.
3. Demografis secara langsung berpengaruh positif terhadap pengangguran yang berarti jika demografis meningkat maka pengangguran juga meningkat. Demografis secara tidak langsung berpengaruh negatif terhadap pengangguran yang berarti jika demografis melalui investasi dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan maka pengangguran akan berkurang. Secara keseluruhan, demografis berpengaruh positif terhadap pengangguran. Hal ini dikarenakan lapangan kerja yang tersedia tidak cukup untuk menampung semua penduduk usia produktif..

Referensi :

- Adioetomo dan Moertiningsih, Sri. 2005. *Bonus Demografi: Hubungan antara Pertumbuhan u dengan Pertumbuhan Ekonomi*. Jakarta: BKKBN.
- Adioetomo dan Samosir. 2013. *Dasar-Dasar Demografi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ahmad, Kamaruddin. 2004. *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ali, S., et.al. 2013. The Impact of Population Growth on Economic Development in Pakistan. *Middle-East Journal of Scientific Research*, Vol 18 (4), 483-491.
- Anitasari, M dan Soleh, A. 2015. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu. *Ekombis Review*, 3(2), 117-127.
- Arifin, Imamul dan Hadi, Gina. 2009. *Membuka Cakrawala Ekonomi*. Bandung: Grafindo.
- Asyhadie, Zaeni. 2007. *Hukum Kerja*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aurangzeb & Haq, A. U. 2012. Impact of Investment Activities on Economic Growth of Pakistan. *Business and Management Review*, 2(1), 92-100.
- Axelrad, H., et.al. 2018. Unemployment among younger and older individuals: does conventional data about unemployment tell us the whole story?. *Journal for Labour Market Research*, 52(3), 1-12.
- Bakti, T. D, Sumanjaya, R dan Nasution, S. H. 2010. *Pengantar Ekonomi Makro*. Medan: USU Press.
- Basri, Faisal dan Munandar, Haris. 2010. *Dasar-Dasar Ekonomi Internasional: Pengenalan dan Aplikasi Metode Kuantitatif*. Jakarta: Kencana.
- Bekti, R.D, dkk. 2014. Model Persamaan Simultan Pada Analisis Hubungan Kemiskinan dan PDRB. *Comtech*, 5(2), 810-817.

- Bloom, David E, David Canning and Jaypee Sevilla, 2003. *The Demographic Dividend: A New Perspective on the Economic Consequences of Population Change*. Santa Monica, CA: Rand.
- Chen, B.-L., et.al. 2016. Relation between growth and unemployment in a model with labor-force participation and adverse labor institutions. *Journal of Macroeconomics*, 50, 273–292.
- Choi, K.H., & Shin, S. 2015. Population aging, economic growth, and the social transmission of human capital: An analysis with an overlapping generations model. *Economic Modelling*, Vol 50, 138–147.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Djumaldi. 2010. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dondeti, V. R., & Mohanty, B. B. (2007). Impact of foreign direct investment on the gross domestic product, exports and imports of four Asian countries: A panel data analysis. *Delhi Business Review*, 8(1), 1-21.
- Dumairy. 2005. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Eachern, William Mc. 2000. *Ekonomi Makro: Pendekatan Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.
- Effendy, Rully Sutansyah. 2019. Pengaruh Upah Minimum Terhadap Pengurangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia. *Fokus Ekonomi*, 14(1), 105-124.
- Forte, R., & Moura, R. (2013). The effects of foreign direct investment on the host country's economic growth: theory and empirical evidence. *The Singapore Economic Review*, 58(3).
- Gilarso. 2004. *Pengantar Ilmu Ekonomi Makro*. Yogyakarta: Kanisius.
- Guga, K., & et.al. (2015). Population, Economic Growth and Development In The Emerging Economies. *European Scientific Journal*, 11, 367-374.
- Gumanti, Tatang Ary. 2011. *Manajemen Investasi Konsep, Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Halim, Abdul. 2005. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, Ishak. 2018. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Ekombis*, 4(2), 133-142.
- <https://bps.go.id>. Berita Resmi Statistik. *Online*. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2020.
- <https://.bkkbn.go.id>. Bonus Demografi. *Online*. Diakses pada tanggal 7 Oktober 2020.
- Husni, Lalu. 2000. *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Irawan, Suparmoko. 2002. *Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: BPFE.
- Jeff-Anyeneh, S. E., & Ibenta, S. N. 2019. Government expenditure and economic growth: Evidence from the Nigeria economy (1981-2016). *Advances in Research*, 19(4), 1–14.
- Jirang, A, Musa, A.H., dan Wijaya, A. 2018. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengangguran Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*, 3(4), 1-13.
- Jogiyanto, 2003. *Teori Portofolio dan Analisis Investasi: Edisi III*. Yogyakarta: BPFE.
- Jumhur. 2019. Kemampuan Investasi dan *Dependency Ratio* Menjelaskan Pengangguran Serta Peran Intervensi Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Mediasi di Indonesia. *Prosiding SATIESP*.
- Kaharudin, Rizaldi, dkk. 2019. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Kemiskinan (Studi Kasus Pada Kota Manado Tahun 2001-2017). *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 19(4), 13-23.
- Kurniawan, A.B, dan Affandi, M. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Investasi terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten Gesik, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2(2).
- Luthfi, A dan Agustin, J.E.S. 2021. Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Nilai Tukar Petani (NTP) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 14-29.
- Mahayana, I Made Alit dan Sukadana, I Wayan. 2014. Pengaruh Upah Minimum Dan Investasi Pada Permintaan Tenaga Kerja di Provinsi Bali. *e-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana*, 3(8), 384-394.

- Mankiw, N. G, Romer, D & Weil, D. N. 1992. A Contribution to the Empirics of Economic Growth, *The Quarterly Journal of Economics*, 107(2), 407-437, 1992.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. *Makroekonomi Edisi Keenam, Macroeconomics 6th Edition*. Terjemahan Fitria Liza dan Imam Nurmawan. Jakarta: Erlangga.
- . 2012. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: Salemba.
- Mantra, I. B. 2000. *Demografi Umum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Moore, J. D., & Donaldson, J. A. 2016. Human-Scale Economics: Economic Growth and Poverty Reduction in Northeastern Thailand. *World Development*, 85,1-15.
- Mulyadi, S. 2014. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Prespektif Pembangunan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muminin, M. Amirul dan Hidayat, Wahyu. 2017. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2015. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(3), 374-384.
- Nanga, Muana. 2005. *Makro Ekonomi: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Pamungkas, P.A dan Suman, Agus. 2017. Pengaruh Upah Minimum terhadap Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia Tahun 2011-2016. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 5(2), 1-20.
- Panjawa, Jihad Lukis dan Soebagiyo, Daryono. 2014. Efek Peningkatan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 15(1), 48-54.
- Prasaja, Mukti Hadi. 2013. Pengaruh Investasi Asing, Jumlah Penduduk dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Tengah Periode Tahun 1980-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3), 72-84.
- Prskawetz, A. & Sambt, J. 2014. Economic support ratios and the demographic dividend in Europe. *Demographic Research*, 30(34), 963-1010.
- Putra, Wahyu Aditama. 2018. Pengaruh Inflasi dan Investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Timur Tahun 1992-2011, *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, 3(1).
- Putri, Siska Anggraini dan Cahyono, Hendry. 2012. Pengaruh Belanja Daerah dan PMDN Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur, *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 4(3), 1-7.
- Rachbini, Didik J. 2008. *Arsitektur Hukum Investasi Indonesia*. Jakarta: PT Indeks, 2008.
- Rahayu, Sri. 2010. *Pengantar Kebijakan Fiskal*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Rahmawati, Ikka Dewi. 2013. Pengaruh Investasi dan Tingkat Upah Terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Timur. *Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 1(3).
- Ruseffendi, E.T. 2010. *Dasar-Dasar Penelitian Pendidikan dan Bidang Non-Eksakta Lainnya*. Bandung: Tarsito.
- Sari, Nur Ravika Famala. 2016. Pengaruh Variabel Ekonomi Makro terhadap Pengangguran Terdidik di Jawa Timur Tahun 2010-2014. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 71-84.
- Salim, HS dan Sutrisno, Budi. 2008. *Hukum Investasi di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perasada.
- Sinaga, Tianggur. 2008. Kebijakan Pengupahan di Indonesia. *Jurnal Ketenagakerjaan*, 3(2). 29-46.
- Siregar, Enni Sari. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Investasi Daerah Sumatera Utara. *Jurnal Education and development*, 2(2), 1-6.
- Suandi. 2010. Hubungan antara Karakteristik Rumah Tangga dengan Partisipasi dalam Keluarga Berencana di Provinsi Jambi: Analisis Data SDKI 2007. *PIRAMIDA: Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia*, 6(2), 1-11.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendra, Indra dan Wicaksono, Bayu Hadi. 2016. Tingkat Pendidikan, Upah, Inflasi, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 6(1), 1-17.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- . 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- . 2007. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia & Ketenagakerjaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- . 2009. *Ekonomi Sumber Daya Manusia Teori dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyana, Utama M. 2013. Potensi Dan Peningkatan Investasi Di Sektor Pertanian Dalam Rangka Peningkatan Kontribusi Terhadap Perekonomian Di Provinsi Bali. *Buletin Studi Ekonomi*. 18(1), 51-57.
- Tambunan, Tulus. 2012. *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Tendelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta: BPFE.
- Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
- Untoro, Joko. 2010. *Ekonomi*. Jakarta: Kawah Media.
- Wahyuni, A.N dan Pramono, N.H. 2021. Pengaruh Faktor Demografi dan Faktor Psikologi Investor dalam Pengambilan Keputusan Investasi di Era Ekonomi Digital. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, 4(1), 73-91.
- Yunianto, Dwi. 2021. Analisis Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk terhadap Pertumbuhan Ekonomi. *Forum Ekonomi*, 23(4), 687-698.
- Yusmarni. 2016. Analisis Bonus Demografi sebagai Kesempatan dalam Mengoptimalkan Pembangunan Pertanian di Sumatera Barat. *Agrisep*, 16(1), 67-82.